

LAPORAN SINGKAT

KOMISI IX DPR RI (BIDANG DEPARTEMEN KESEHATAN, DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, BADAN PENGAWAS OBAT & MAKANAN, DAN BKKBN)

Tahun Sidang	: 2006-2007
Masa Persidangan	: III
Jenis	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Direktur Utama PT. Askes (Persero)
Sifat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Selasa, 20 Maret 2007
Waktu	: Pukul 19.30 WIB - selesai
Ketua Rapat	: Dr. Ribka Tjiptaning / Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris	: Surjadi / Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Gedung Nusantara I Lantai 1 Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Acara	: Membicarakan masalah anggaran kesehatan masyarakat miskin
Anggota yang hadir	: 27 orang Anggota dari 48 Anggota Komisi IX DPR RI, 11 orang ijin.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Direktur Utama PT. Askes (Persero) dibuka pukul 20.00 WIB setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 99 ayat (1) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Dan dilanjutkan paparan oleh Direktur Utama PT. Askes (Persero).

II. KESIMPULAN / KEPUTUSAN :

Setelah mendengarkan paparan/jawaban dari Direktur Utama PT. Askes (Persero) atas usul/saran dari Anggota Komisi IX DPR RI, Ketua rapat membacakan beberapa kesimpulan/ keputusan yaitu :

1. Komisi IX DPR RI mendesak agar PT. Askes (Persero) melakukan pemutakhiran data masyarakat miskin dengan melakukan koordinasi dengan BPS dan Pemerintah Daerah, untuk menyesuaikan ketersediaan dana Askeskin.
2. Komisi IX DPR RI mendorong agar PT. Askes (Persero) melakukan pembayaran klaim secepatnya sebagaimana diatur Undang-Undang SJSN.
3. Komisi IX DPR RI mewajibkan agar PT. Askes (Persero) konsisten dan terbuka serta memiliki mekanisme dan prosedur yang jelas dalam hal sosialisasi dan masalah pendanaannya.
4. Komisi IX DPR RI berpendapat perlu adanya pertemuan antara Komisi IX DPR RI, Depkes, PT. Askes (Persero) dan BPS untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi program Askeskin
5. Komisi IX DPR RI mendesak PT. Askes (Persero) mendorong berfungsinya secara utuh Komite Medik di Rumah Sakit - Rumah Sakit, untuk melakukan pengawasan terhadap *reimbursement*, agar tidak terjadi penyelewengan, guna kelanjutan dan ketersediaan dana Askeskin ke depan.
6. Komisi IX DPR RI dapat memahami penjelasan dari PT. Askes (Persero) dan untuk itu mendesak pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program-program Askeskin, dengan lebih meningkatkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan komunikasi dalam menyatukan pengambilan keputusan agar konsisten dalam penetapan dan implementasi program Askeskin yang mengacu pada konsep SJSN.
7. Komisi IX DPR RI berpendapat perlu melakukan RDPU dengan LSM yang melakukan pendampingan terhadap warga yang menerima program Askeskin dan masyarakat miskin pengguna Askeskin sebagai tindak lanjut RDP tanggal 20 Maret 2007.

Rapat ditutup pukul 23.00 WIB.

Jakarta, 20 Maret 2007

Pemerintah
Direktur Utama PT. Askes (Persero)

Pimpinan Komisi IX DPR-RI
Ketua,

Dr. Orie Andari Sutadji, MBA

Dr. Ribka Tjiptaning

**DRAFT KESIMPULAN
RDP KOMISI IX DPR RI DENGAN DIRUT PT. ASKES (PERSERO)
SELASA 20 MARET 2007**

1. Komisi IX DPR RI mendesak PT. Askes (Persero) mendorong berfungsinya secara utuh Komite Medik di Rumah Sakit - Rumah Sakit, untuk melakukan pengawasan terhadap *reimbursement*, agar tidak terjadi penyelewengan, guna kelanjutan dan ketersediaan dana Askeskin ke depan.
2. Komisi IX DPR RI dapat memahami penjelasan dari PT. Askes (Persero) dan untuk itu mendesak pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program-program Askeskin, dengan lebih meningkatkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan komunikasi dalam menyatukan pengambilan keputusan agar konsisten dalam penetapan dan implementasi program Askeskin yang mengacu pada konsep SJSN.
3. Komisi IX DPR RI mendorong agar PT. Askes (Persero) melakukan pembayaran klaim secepatnya sebagaimana diatur Undang-Undang SJSN.
4. Komisi IX DPR RI mendesak agar PT. Askes (Persero) melakukan pemutakhiran data masyarakat miskin dengan melakukan koordinasi dengan BPS dan Pemerintah Daerah, untuk menyesuaikan ketersediaan dana Askeskin.
5. Komisi IX DPR RI mewajibkan agar PT. Askes (Persero) konsisten dan terbuka serta memiliki mekanisme dan prosedur yang jelas dalam hal sosialisasi dan masalah pendanaannya.
6. Dengan adanya penjelasan dan tanggapan PT. Askes (Persero) terhadap berita Koran Tempo tanggal 20 Maret 2007, Komisi IX DPR RI dapat memahami dan perlu adanya pertemuan lebih lanjut antara Komisi IX DPR RI, Depkes, PT. Askes (Persero) dan BPS untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi program Askeskin.
7. Komisi IX DPR RI berpendapat perlu melakukan RDPU dengan LSM yang melakukan pendampingan terhadap warga yang menerima program Askeskin dan masyarakat miskin pengguna Askeskin sebagai tindak lanjut RDP tanggal 20 Maret 2007.

DRAFT KESIMPULAN / RANGKUMAN

RDP KOMISI IX DPR RI DENGAN DIRUT PT. ASKES (PERSERO)

SELASA, 20 MARET 2007

- a. Komisi IX DPR RI mendesak agar PT. Askes (Persero) melakukan pemutakhiran data masyarakat miskin dengan melakukan koordinasi dengan BPS dan Pemerintah Daerah, untuk menyesuaikan ketersediaan dana Askeskin.
- b. Komisi IX DPR RI mendorong agar PT. Askes (Persero) melakukan pembayaran klaim secepatnya sebagaimana diatur Undang-Undang SJSN.
- c. Komisi IX DPR RI mewajibkan agar PT. Askes (Persero) konsisten dan terbuka serta memiliki mekanisme dan prosedur yang jelas dalam hal sosialisasi dan masalah pendanaannya.
- d. Dengan adanya penjelasan dan tanggapan PT. Askes terhadap berita koran Tempo tanggal 20 Maret 2007, komisi IX DPR RI dapat memahami dan perlu adanya pertemuan lebih lanjut antara Komisi IX DPR RI, Depkes, PT. Askes (Persero) dan BPS untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi program Askeskin.
- e. Komisi IX DPR RI mendesak PT. Askes (Persero) mendorong berfungsinya secara utuh Komite Medik di Rumah Sakit - Rumah Sakit, untuk melakukan pengawasan terhadap *reimbursement*, agar tidak terjadi penyelewengan, guna kelanjutan dan ketersediaan dana Askeskin kedepan.
- f. Komisi IX DPR RI mendesak pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program program Askeskin, lebih meningkatkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan komunikasi dalam menyatukan pengambilan keputusan agar konsisten dalam penetapan dan implementasi program Askeskin yang mengacu pada konsep SJSN.
- g. Komisi IX DPR RI berpendapat perlu melakukan RDPU dengan LSM yang melakukan pendampingan terhadap warga yang menerima program Askeskin dan masyarakat miskin pengguna Askeskin sebagai tindak lanjut RDP hari ini.

8. Rapat ditutup pukul 23.00 WIB

Jakarta, 20 Maret 2007

Pemerintah,
Direktur Utama
PT. Askes (Persero)

Pimpinan Komisi IX DPR RI
Ketua,

.....

Dr. Ribka Tjiptaning